

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di dalam sebuah pemerintahan pasti terdapat pemerintah daerah yang mengatur tata kelola suatu daerah dan bertanggung jawab dengan daerah itu. Pemerintah daerah memiliki tujuan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah daerah yang bekerja sama dengan dewan perwakilan rakyat daerah dengan diikuti asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip yang berada di otonomi daerah dan prinsip negara kesatuan yang di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah juga di atur dalam peraturan perundang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih megoptimalkan kerja dari suatu pemerintahan daerah.

Menurut Pasal 120 UU No.32 tahun 2004 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan perangkat daerah dari suatu pemerintah daerah yang bertujuan sebagai pusat pertanggung jawaban atas jalannya suatu pemerintah daerah dan pembangunan daerah. SKPD dipimpin oleh kepala satuan kerja.

Pemerintahan yang baik harus memiliki tata kelola pemerintahan yang baik juga karena tata kelola pemerintah yang baik itu penting bagi kesejahteraan sosial. Tidak seperti kasus yang terjadi di Purwokerto Kejaksaan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah, menetapkan tiga perangkat Desa Krajan, Kabupaten Banyumas, sebagai tersangka tindak pidana

korupsi. Mereka diduga membuat laporan fiktif pemakaian dana desa, dana bantuan gubernur, dan dana bantuan bupati sehingga merugikan negara Rp 400 juta. Tiga tersangka itu antara lain Kepala Desa Krajan berinisial MS, sekretaris desa MD, serta kepala seksi kesejahteraan dan pembangunan desa NC (Kompas.id, 2017). Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga menetapkan mantan Camat Purbalingga RM sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan APBD. Penetapan RM sebagai tersangka dilakukan melalui Surat Penetapan Nomor B-1586/M323/Fd2/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat disebutkan bahwa kerugian negara mencapai Rp424.965.970. Itu untuk penggunaan APBD mulai tahun 2017 hingga tahun 2020. Dari jumlah tersebut tersangka sudah mengembalikan sebesar Rp110.115.446 (jateng.bpk.go.id, 2021).

Tata kelola pemerintahan yang baik sering disebut juga dengan good governance sesuai dengan yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah salah satu fungsi dan tanggung jawab dari suatu pemerintahan. Salah satu dari indikator dari tata kelola pemerintahan yang baik ialah transparansi informasi kepada masyarakat, salah satunya adalah transparansi informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Faktor-faktor yang bisa mendukung dalam transparansi informasi keuangan yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern.

Dalam *Al-qur'an* telah disampaikan kepada manusia untuk wajib menyampaikan amanah kepada orang yang telah menitipkan amanah nya, tercatat dalam *Qur'an* surat *An-nisa'* ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (Q.S. An-Nisa’: 58).*

Dapat disimpulkan dari penjelasan *Qur'an* di atas bahwa kita sebagai umat islam harus menyampaikan amanah yang telah diberikan dan menjaganya dengan baik dan benar. Jika kita sebagai umat islam tidak menyampaikan dan menjaga amanah yang sudah di berikan maka kita akan mendapat ganjaran dari Allah SWT. Menyampaikan suatu amanah harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dalam bidang akuntansi Standar itu dikenal dengan Standar Akuntansi dan pada pemerintahan dikenal dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

SAP merupakan prinsip akuntansi yang diberlakukan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan (Indra Bastian, 2010: 138). Pemerintah yang menerapkan SAP dapat menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan dalam ekosistem sebuah pemerintahan. Dengan adanya SAP itu diperlukan agar semuanya berjalan dengan struktur dan sesuai dengan pedoman SAP yang berlaku sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat. SAP yang baik didukung dengan

adanya teknologi yang baik pula maka dari itu supaya dapat meningkatkan SAP yang baik di butuhkan pemanfaatan teknologi dalam akuntansi.

Pemanfaatan teknologi merupakan suatu teknologi untuk mengolah data, memproses, menyusun, menyimpan, mendapatkan, memanipulasi data, dalam beberapa cara yang memiliki tujuan supaya diharapkan mendapatkan hasil informasi berkualitas, informasi relevan, akurat, dan tepat waktu Dalam implikasinya pemanfaatan teknologi dapat digunakan untuk urusan pribadi, bisnis, hingga pemerintah untuk mengolah data keuangan. Dalam mendukung teknologi informasi itu sendiri untuk pemrosesan dan penyimpanan dibutuhkan komputer, database, jaringan, dan lain-lain yang di butuhkan untuk pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mendukung pemanfaatn teknologi informasi yang baik harus didukung juga dengan kopetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik sehingga menimbulkan perpaduan yang baik untuk organisasi.

Kompetensi SDM ialah kemampuan seseorang individu untuk melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab yang di berikan kepada seorang individu. SDM yang berkualitas bisa dilihat dari beberapa faktor yaitu latar belakang pendidikan, pelatihan yang dapat diikuti, ketampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan. Kompetensi memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan bertanggung jawab (Nurjaya et al., 2021). Dengan adanya kualitas SDM

yang baik diharapkan mampu melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan lebih baik.

SAKD merupakan bagian dari kumpulan subsitem yang disetiap subsitem memiliki peraturan yang harus ditaati disaat mengumpulkan dan mencatat laporan keuangan, setelah itu mengolah data tersebut agar menjadi beragam laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun pihak internal dalam sebuah pemerintahan (Jultri & Made, 2021). Jika sistem akuntansi belum dapat dipahami dapat menghambat disaat mengumpulkan laporan keuangan. Pemerintah juga sudah mengupayakan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan berdasarkan SAKD sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkat. Dengan adanya SAKD yang terstruktur tidak luput dari Standar Pengendalian Internal (SPI) yang baik sehingga dapat menciptakan SAKD yang dapat dilaksanakan atau diikuti dengan baik oleh karyawan.

SPI adalah suatu elemen yang penting dalam melaksanakan tanggungjawab untuk memantau dan mengendalikan suatu organisasi (Trisnawati & Wiratmaja, 2018). SPI adalah tindakan yang dilakukan pada sektor keuangan dan non keuangan untuk memastikan perlindungan terhadap aset, deteksi, dan pencegahan penipuan, dengan memenuhi syarat dan prosedur kebijakan *internal control* dan akurasi kelengkapan catatan. Jika suatu pemerintah dapat menerapkan SPI dengan baik maka dapat memonitor semua operasi, SDM, dan data dengan maksimal sehingga dapat mengurangi risiko supaya tercapai tujuan dan informasi yang didapatkan

lebih berkualitas. Dengan adanya SPI yang terstruktur dan efektif akan menciptakan sebuah laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh suatu instansi pemilik laporan keuangan. Laporan keuangan pada instansi pemerintah maupun daerah berbeda dengan laporan keuangan pada perusahaan karena memiliki standar yang berbeda yaitu apabila laporan keuangan pada instansi pemerintah mengacu pada SAKD sedangkan untuk perusahaan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Putri & Djuita, 2021).

Pada pemerintahan daerah ataupun pemerintahan pusat standar akuntansi yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2010, antara lain:

1. Mengadakan informasi yang berbentuk kecukupan dalam penerimaan periode yang sudah berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang sedang dijalani.
2. Mengadakan informasi yang berbentuk cara-cara dalam mendapatkan sumber daya ekonomi yang sesuai dan alokasi yang tepat terhadap anggaran yang sudah ditetapkan dan aturan perundang-undangan yang berlaku

3. Mengadakan informasi yang berbentuk seberapa banyak sumber daya ekonomi yang sudah digunakan untuk kegiatan-kegiatan dan hasil yang sudah diperoleh
4. Mengadakan informasi yang berbentuk dana yang telah digunakan untuk kegiatan dan memperoleh kasnya sebagai entitas pelaporan
5. Mengadakan informasi yang berbentuk posisi keuangan yang didapatkan dari sumber penerimaan jangka pendek maupun jangka panjang termasuk juga pajak dan pinjaman yang diperoleh
6. Mengadakan informasi yang berbentuk melihat apakah telah terjadi perubahan posisi keuangan yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan pada saat periode yang sudah ditentukan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap opininya mengandung penilaian, penilaian yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat 4 penilaian, antara lain : (1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (3) Tidak Wajar (TW), (4) Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) (Tawaqal & Suparno, 2017).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan kegiatan audit setiap tahun kepada pemerintah daerah terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di seluruh Provinsi di Indonesia, salah satunya yaitu Kabupaten Banyumas. Dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap Kabupaten Banyumas. Pada implementasinya Kabupaten

Banyumas dari tahun 2016-2020 opini yang disajikan oleh BPK RI terlihat dari hasil pemeriksaan LKD dapat dilihat dari tabel.

**Tabel 1.1**  
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Tahun	Opini BPK
2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2017	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2018	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2019	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2020	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber: [jateng.bpk.go.id/lhp-lkpd/](http://jateng.bpk.go.id/lhp-lkpd/)

Melihat dari Tabel 1.1 hasil dari audit tabel yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pemerintah Kabupaten Banyumas mencatatkan hasil yang baik, yaitu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang benar sehingga mendapatkan opini yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam penelitian terdahulu oleh Cahmawati & Romadhon (2021) menyatakan, bahwa peran teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, internal audit, dan standar akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Wonosobo. Sedangkan, menurut Jultri & Made (2021), menyatakan, Kompetensi SDM, sistem akuntansi keuangan daerah, dan *new public management* berpengaruh positif terhadap laporan keuangan pada BKAD Kabupaten Malang tetapi untuk

variable SAP berpengaruh negatif. Sedangkan, menurut Trisnawati & Wiratmaja (2018) menyatakan, kualitas sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian Tampubolon dan Basid (2019) Teknologi Informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan, Andelina dan Hariyanto (2017) Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Demak.

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa perbedaan faktor dan objek dari peneliti-peneliti sebelumnya yang membuat rancunya kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Cahmawati & Romadhon (2021) yang berjudul “Pengaruh Peran Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” adapun penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yang terdapat pada obyek yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya menggunakan obyek pada SKPD Kabupaten Wonosobo, sedangkan pada penelitian ini menggunakan obyek pada SKPD Kota Purwokerto, serta penulis menambahkan satu variabel independen yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis sampaikan tersebut dan penelitian terdahulu Cahmawati & Romadhon (2021) penulis tertarik

untuk melakukan penelitian replikasi mengenai peran teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, peran internal audit, dan standar akuntansi pemerintah serta menambahkan satu variabel independen yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan mengubah obyek penelitian. Penulis memilih SAKD sebagai variabel independen dikarenakan pada penelitian sebelumnya peneliti meminta untuk menambahkan variabel dan mengganti obyek agar dapat diperoleh gambaran dan hasil yang bervariasi tentang kualitas laporan keuangan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka penulis menentukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Standara Akuntansi, Pemanfaatna Teknologi Informmasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan “**.

Motivasi penelitian ini adalah masih terdapat perbedaan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga belum ada yang meneliti di Kota Purwokerto. Maka penulis tertarik untuk meneliti kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerinah
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh laporan keuangan terhadap teknologi informasi
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh laporan keuangan terhadap kompetensi sumber daya manusia
4. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh laporan keuangan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah

5. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh laporan keuangan terhadap pengendalian internal

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang sudah ditulis oleh penulis, penelitian ini dimaksud untuk mempunyai manfaat bagi pendidikan untuk kedepannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai, berikut:

- 1) Memberikan kontribusi pemikiran untuk kualitas laporan keuangan dengan poin penting pada standar akuntansi pemerintah, teknologi informasi, kompetensi sumberdaya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pengendalian intern.
- 2) Memberikan pandangan terhadap cara meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- 3) Sebagai contoh bagi penelitian selanjutnya untuk meninjau lebih lanjut penelitian pada kualitas laporan keuangan pada SKPD pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat antara lain:

- 1) Bagi SKPD Kota Purwokerto.

Menjadi referensi agar mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Purwokerto.

2) Bagi pengguna laporan keuangan

Bagi pengguna laporan keuangan, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengguna laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan supaya dapat menjaga konsisten dan kualitas laporan keuangan itu sendiri.